

**LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN
2024**

TERDIRI DARI :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2. NERACA
3. LAPORAN OPERASIONAL
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN KEUANGAN	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B. NERACA	
C. LAPORAN OPERASIONAL	
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
Data Umum	1
Letak Geografis	1
Penduduk Dan Ketenagakerjaan	1
Sumber Daya Lahan	1
Sumber Daya Hutan	2
Sumber Daya Air	2
Sumber Daya Mineral	2
Struktur Organisasi	2
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	9
2.1.1 Tingkat Kemiskinan	9
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	10
2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)	11
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	12
2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.6 Inflasi	13
2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut	14
2.2 Kebijakan Keuangan	15
2.2.1 Kebijakan Pendapatan	15
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	15
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	17
2.2.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Apbd	19



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali	20
3.2 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan	20
3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
3.4.1 Akuntansi Pendapatan – LRA / LO	21
3.4.2 Akuntansi Belanja - Beban	21
3.4.3 Akuntansi Pembiayaan	22
3.4.4 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran	23
3.4.5 Akuntansi Kas dan Setara Kas	24
3.4.6 Akuntansi Piutang	24
3.4.7 Akuntansi Persediaan	25
3.4.8 Akuntansi Investasi	26
3.4.9 Akuntansi Aset Tetap	29
3.4.10 Akuntansi Kewajiban	31
3.4.11 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	32
3.4.12 Akuntansi Ekuitas	32
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN SKPD	33
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	33
4.1.1 Pendapatan	33
4.1.2 Belanja	34
4.2 Neraca	43
4.2.1 Aset	43
4.2.2 Kewajiban	51
4.2.3 Ekuitas	52
4.3 Laporan Operasional	53
4.3.1 Kegiatan Operasional	53
4.4 Penjelasan Atas Laporan perubahan Ekuitas	62
4.4.1 Ekuitas Awal	63
4.4.2 Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024	63
4.4.3 RK PPKD	63
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD	64
5.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	64
5.1.1 Bencana Alam	64
5.2 Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang Batal Dilaksanakan	64
BAB VI PENUTUP	67



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut	9
Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut	10
Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut	10
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut.....	11
Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut	11
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut	12
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut	13
Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut.....	13
Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran ..	14
Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024	19
Tabel 11 Penyisihan Piutang	25
Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen	28
Tabel 13 Pendapatan Asli daerah	33
Tabel 14 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah.....	34
Tabel 15 Rincian Belanja Operasi.....	35
Tabel 16 Rincian Belanja Pegawai.....	36
Tabel 17 Rincian Belanja Barang dan Jasa	36
Tabel 18 Rincian Belanja Hibah	37
Tabel 19 Realisasi Belanja Modal 2024.....	38
Tabel 20 Belanja Modal Tanah	38
Tabel 21 Rincian Belanja Modal Tanah.....	39
Tabel 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	39
Tabel 23 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40
Tabel 24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	41
Tabel 25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41
Tabel 26 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	41
Tabel 27 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	42
Tabel 28 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	42
Tabel 29 Rincian Saldo Persediaan	44
Tabel 30 Rincian Saldo Aset Tetap.....	44
Tabel 31 Rincian Tanah	45
Tabel 32 Rincian Peralatan dan Mesin.....	46
Tabel 33 Rincian Gedung dan Bangunan.....	47
Tabel 34 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	47
Tabel 35 Rincian Aset Tetap Lainnya	48
Tabel 36 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	48
Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	49
Tabel 38 Rincian Saldo Aset Lainnya	49
Tabel 39 Rincian Aset Tidak Berwujud.....	50
Tabel 40 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	50
Tabel 41 Rincian Aset Lain-Lain	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 42 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	51
Tabel 43 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek	52
Tabel 44 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	53
Tabel 45 Pendapatan LO	53
Tabel 46 Pendapatan Retribusi.....	54
Tabel 47 Rincian Beban	54
Tabel 48 Rincian Beban Operasi.....	54
Tabel 49 Rincian Beban Pegawai.....	55
Tabel 50 Rincian Beban Persediaan	56
Tabel 51 Rincian Beban Jasa	57
Tabel 52 Rincian Beban Pemeliharaan	59
Tabel 53 Rincian Beban Perjalanan Dinas	61
Tabel 54 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	61
Tabel 55 Rincian Beban Hibah	62
Tabel 56 Rincian Beban Amortisasi.....	62
Tabel 57 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	65
Tabel 58 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Bidang Bina Marga.....	65
Tabel 59 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Bidang Sumber daya Air	66



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan (Stock Opname) Periode 01 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024
Lampiran 2	Struk Pembayaran Tagihan PLN bulan Desember 2024
Lampiran 3	Struk Pembayaran PDAM bulan Desember 2024



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	685.205.000,00	137,04	386.795.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	685.205.000,00	137,04	386.795.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	685.205.000,00	137,04	386.795.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	685.205.000,00	137,04	386.795.000,00
5	BELANJA DAERAH	608.767.318.044,00	564.451.878.762,00	92,72	485.362.122.704,00
5.1	BELANJA OPERASI	216.509.904.978,00	200.655.193.390,00	92,68	143.165.785.757,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.515.359.600,00	9.472.226.600,00	90,08	8.496.567.682,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.253.727.196,00	178.286.764.490,00	92,74	122.422.111.275,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.740.818.182,00	12.896.202.300,00	93,85	12.247.106.800,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	216.509.904.978,00	200.655.193.390,00	92,68	143.165.785.757,00
5.2	BELANJA MODAL	392.257.413.066,00	363.795.885.372,00	92,74	342.196.336.947,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.477.000.000,00	3.139.900.500,00	57,33	825.184.613,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.543.590.998,00	5.263.486.329,00	94,95	839.086.126,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.181.494.241,00	127.452.081.567,00	97,16	114.596.973.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	249.977.283.727,00	227.877.516.976,00	91,16	225.935.092.408,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	78.044.100,00	62.500.000,00	80,08	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	392.257.413.066,00	363.795.885.372,00	92,74	342.196.336.947,00
	JUMLAH BELANJA	608.767.318.044,00	564.451.878.762,00	92,72	485.362.122.704,00
	SURPLUS/DEFISIT	(608.267.318.044,00)	(563.765.873.762,00)	92,68	(484.975.327.704,00)



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.019.565.025.510,85	1.655.866.560.738,85
1.1	ASET LANCAR	43.060.000,00	140.480.600,00
1.1.12	Persediaan	43.060.000,00	140.480.600,00
	JUMLAH ASET LANCAR	43.060.000,00	140.480.600,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	2.011.529.935.414,85	1.647.796.550.042,85
1.3.01	Tanah	315.183.400.710,15	312.043.500.210,15
1.3.02	Peralatan dan Mesin	20.921.361.710,65	15.657.875.381,65
1.3.03	Gedung dan Bangunan	145.765.555.785,25	18.313.474.218,25
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.531.103.773.094,60	2.303.225.856.118,60
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.111.106.657,00	1.111.106.657,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.679.845.346,00	16.679.845.346,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.019.235.107.888,80)	(1.019.235.107.888,80)
	JUMLAH ASET TETAP	2.011.529.935.414,85	1.647.796.550.042,85
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	7.992.030.096,00	7.929.530.096,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	812.037.000,00	749.537.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	7.766.226.090,42	7.766.226.090,42
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(379.233.000,00)	(379.233.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(206.999.994,42)	(206.999.994,42)
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.992.030.096,00	7.929.530.096,00
	JUMLAH ASET	2.019.565.025.510,85	1.655.866.560.738,85
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	28.692.768,00	24.703.682,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.692.768,00	24.703.682,00
2.1.06	Utang Belanja	28.692.768,00	24.703.682,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28.692.768,00	24.703.682,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	28.692.768,00	24.703.682,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.771.687.545.320,47	1.407.993.069.634,47
3.1	EKUITAS	1.771.687.545.320,47	1.407.993.069.634,47
3.1.01	Ekuitas	1.207.921.671.558,47	1.407.993.069.634,47
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	563.765.873.762,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH EKUITAS	1.771.687.545.320,47	1.407.993.069.634,47
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.771.716.238.088,47	1.408.017.773.316,47

Kab. Tanah Laut, 30-01-2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan



SYAKHRIL HARDRIANADI, ST
NIR. 197504121996031002

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
	JUMLAH PENDAPATAN	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
8	BEBAN	200.756.603.076,00	143.421.690.497,00	57.334.912.579,00	39,98
8.1	BEBAN OPERASI	200.756.603.076,00	143.271.783.097,00	57.484.819.979,00	40,12
8.1.01	Beban Pegawai	9.472.226.600,00	8.535.616.768,00	936.609.832,00	10,97
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	178.388.174.176,00	122.489.059.529,00	55.899.114.647,00	45,64
8.1.05	Beban Hibah	12.896.202.300,00	12.247.106.800,00	649.095.500,00	5,30
	JUMLAH BEBAN OPERASI	200.756.603.076,00	143.271.783.097,00	57.484.819.979,00	40,12
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	149.907.400,00	(149.907.400,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	149.907.400,00	(149.907.400,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	200.756.603.076,00	143.421.690.497,00	57.334.912.579,00	39,98
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(200.071.398.076,00)	(143.034.895.497,00)	(57.036.502.579,00)	39,88

Kab. Tanah Laut, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
SYAKHRIL HARDRIANADI, ST
NIP.197504121996031002



PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)		
URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.407.993.069.634,47	1.551.027.965.131,47
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(200.071.398.076,00)	(143.034.895.497,00)
RK PPKD	563.765.873.762,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.771.687.545.320,47	1.407.993.069.634,47

Kab. Tanah Laut, 30 Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
SYAKHRIL HARDRIANADI, ST
NIP. 397504121996031002



BAB I

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 364.117 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 1.156 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 530 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 455 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah sebanyak 67,97 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 67,12% dan 2,49% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 42,48% disusul sektor perdagangan sebesar 20,60% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mencapai 13,52%.

SUMBER DAYA LAHAN

Tahun 2024 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 36,521 Ha, lading/huma seluas 12.630 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.436,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.408 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman



andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2024 mencapai 12.692 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2024 sebesar 14.852 Ha.

SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 70.157,61 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.157,61 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

SUMBER DAYA AIR

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2024 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

SUMBER DAYA MINERAL

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi empat belas kali pergantian jabatan bupati. Pada Tahun 2024 Tanah Laut dipimpin oleh Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan wakilnya H. Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 dan berakhir pada tanggal 19 September 2024, yang kemudian digantikan oleh Penjabat Bupati Tanah Laut yaitu Ir. Syamsir Rahman, MS. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Tanah Laut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pada Tahun 2010 juga telah terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dimana terjadi perubahan pada SKPD Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dimana terjadi perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut diubah menjadi Inspektorat Kabupaten, serta kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula dihapus kemudian disisipkan kembali dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, mengikuti arah dan pedoman sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga penataan organisasi dapat efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Inspektorat Kabupaten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- 10) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Dinas Pemuda dan Olahraga



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- 19) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 20) Dinas Pariwisata;
- 21) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 23) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 24) Badan Pendapatan Daerah;
- 25) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 29) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 30) Kecamatan Pelaihari;
- 31) Kecamatan Tambang Ulang;
- 32) Kecamatan Kurau;
- 33) Kecamatan Bati Bati;
- 34) Kecamatan Batu Ampar;
- 35) Kecamatan Panyipatan;
- 36) Kecamatan Takisung;
- 37) Kecamatan Jorong;
- 38) Kecamatan Kintap;
- 39) Kecamatan Bajuin;
- 40) Kecamatan Bumi Makmur.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pola tata kelola di 15 (lima belas) Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pada UPT Puskesmas Asam-Asam, UPT Puskesmas Batakan, UPT Puskesmas Bumi Makmur, UPT Puskesmas Jorong, UPT Puskesmas Kait-Kait, UPT Puskesmas Kintap, UPT Puskesmas Padang Luas, UPT Puskesmas Panyipatan, UPT Puskesmas Pelaihari, UPT Puskesmas Sungai Cuka, UPT Puskesmas Sungai Riam, UPT Puskesmas Tambang Ulang, UPT Puskesmas Takisung, UPT Puskesmas Tanjung Habulu, UPT Puskesmas Tirta Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/944-KUM/2020 tanggal 30 Desember 2020 namun efektif pada tanggal 1 April 2021. Pada tahun 2023 terdapat lagi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/437-KUM/2023 tentang Penetapan 2 (dua) unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat dan 1 (satu) unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada tanggal 14 Januari 2022, yaitu UPT Puskesmas Bentok Kampung, UPT Puskesmas Durian Bungkok dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 81 tahun 2018 terdapat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yaitu pada 236 (dua ratus tiga puluh enam) Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pada 48 (empat puluh delapan) Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berlaku efektif paling lambat 1 Januari 2020. Kemudian di tahun 2019 telah didirikan satuan pendidikan baru SMPN 6 Kintap di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/606-KUM/2019. .



1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024 LD No 5 Tanggal 28 Desember 2023;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024 (LD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 9) Tanggal 18 September 2024;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 25) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Kebijakan akuntansi
	3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis akrual pertama kali
	3.2 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan SKPD
	3.3 Basis akuntansi yang mendasari pelaporan keuangan
	3.4 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
BAB IV	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
	4.1 Laporan Realisasi Anggaran
	4.1.1 Pendapatan
	4.1.2 Belanja
	4.2 Neraca
	4.2.1 Aset
	4.2.2 Kewajiban
	4.2.3 Ekuitas
	4.3 Laporan Operasional
	4.3.1 Kegiatan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

PENDAHULUAN	
	4.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas
	4.4.1 Ekuitas Awal
	4.4.2 Surplus (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024
	4.4.3 RK PPKD
BAB V	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan skpd
BAB VI	Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO/EKONOMI REGIONAL

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

- 1) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,73%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,58%.
- 3) Gini Ratio sebesar 0,26%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,98%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,78%;
- 6) Tingkat Inflasi sebesar 2,43%;
- 7) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp20.165,71.

2.1.1 TINGKAT KEMISKINAN

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kab/Kota (%)	3,86	3,73	(0,13)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	13,54	13,22	(0,32)
3	Provinsi (%)	4,49	4,29	0,20



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
4	Nasional (%)	9,57	9,36	0,21
5	Peringkat Provinsi	11,00	33,00	turun
6	Peringkat Nasional	409,00	528,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 sebesar 3,73% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,13% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,37	0,30	(0,07)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,63	0,61	(0,02)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	9,00	33,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,06	0,07	0,01
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,16	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	11,00	29,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 3,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	4,17	3,58	(0,59)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,74	4,31	(0,43)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,90	5,32	0,58
4	Peringkat Provinsi	17,00	22,00	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,58%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,17%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

2.1.3 INDEKS GINI (GINI RATIO)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kab/ Kota	0,26	0,26	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,31	0,31	0,00
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	11	26	turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.



2.1.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60)
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- 4) Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 72,98 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten/Kota	70,35	72,98	2,63
2	Provinsi	71,84	74,66	2,82
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	0,62
4	Peringkat Provinsi	7,00	9,00	turun
5	Peringkat Nasional	251,00	251,00	tetap

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 72,98 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,35 poin mengalami kenaikan sebesar 2,63 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 9 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 251 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 21 dari 34 Provinsi di Indonesia.

2.1.5 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

No.	IPM (Tingkat)	Kabupaten/Kota		Provinsi Tahun 2024	Nasional Tahun 2024
		Tahun 2023	Tahun 2024		
1	PDRB Menurut Jenis Pengeluaran (harga konstan 2010) (Rp)	11.056.020,00	11.584.220,00	149.230.963,17	12.439.449.618,31
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	4,78	4,84	5,05
3	Peringkat Provinsi	6	6	21	0,00

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 4,78%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.6 INFLASI

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*high inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (*hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 2,43% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut (%)	6,98 (Banjarmasin)	2,43 (Banjarmasin)	(4,47)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,99	2,43	(4,47)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	(2,90)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,43%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,98%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut sama dengan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan namun lebih rendah dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7 STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.962,56	3.099,64
2	Pertambangan dan Penggalian	6.523,43	6.672,86
3	Industri Pengolahan	1.997,87	2.136,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,69	18,30
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	30,30	32,32
6	Konstruksi	1.211,29	1.347,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.986,70	2.124,47
8	Transportasi dan Pergudangan	1.054,81	1.248,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	254,80	284,27
10	Informasi dan Komunikasi	513,58	548,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	235,49	254,06
12	<i>Real Estate</i>	327,41	358,99
13	Jasa Perusahaan	59,16	66,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	882,21	949,24
15	Jasa Pendidikan	643,16	671,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,62	210,81
17	Jasa Lainnya	127,10	142,80
18	Produk Domestik Bruto	19.019,18	20.165,71

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut



2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 1. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 2. Dana Insentif Daerah
 3. Dana Otonomi Khusus
 4. Dana Keistimewaan
 5. Dana Desa
 - b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:
 - a. Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2024 meliputi:

- 1) Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;
- 2) Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

2.2.2 KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;



- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah;
- f. Belanja Bantuan Sosial;
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya disematkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2024, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut.

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.



- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

2.2.3 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan



- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2024 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (siswa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

2.2.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode Akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.



2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan di atas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	APBD-P 2024
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	800.000.000	500.000.000
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	194.553.040.286	216.509.904.978
5.2	Belanja Modal	367.822.413.588	392.257.413.066
	Total Surplus/(Defisit)	(561.575.453.874)	(608.267.318.044)



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

3.1 IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PERTAMA KALI

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2024 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023.

3.2 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuat sebagai dasar Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

3.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- 1) Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- 2) Basis Akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



3.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan asas:

- 1) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

3.4.2 AKUNTANSI BELANJA - BEBAN

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debet Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;



- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*threshold capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

1. Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
2. Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;
3. Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas;
4. Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
5. Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

3.4.3 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.



Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

3.4.4 AKUNTANSI ANGGARAN, AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT DAN AKUNTANSI NON ANGGARAN

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;
- 4) Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.5 AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

3.4.6 AKUNTANSI PIUTANG

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD,



perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,50
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	30
3	>2 -3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

3.4.7 AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:
2. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
3. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
4. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
5. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

3.4.8 AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan



meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

No.	Umur Dana Bergulir	Kategori	Penyisihan Dana Bergulir (%)
1	0 – 4 tahun	Lancar	0
2	> 4 – 5 tahun	Ragu Tertagih	50
3	> 5 tahun	Macet	100

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menangani.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi asset

3.4.9 AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;
- 2) aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan *overhaul* pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan *overhaul* yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.



Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

3.4.10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini,



dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3.4.11 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3.4.12 AKUNTANSI EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan SKPD yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

4.1.1 PENDAPATAN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
500.000.000,00	685,205,000.00	386.795.000,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
500.000.000,00	685,205,000.00	386.795.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah	500.000.000,00	685,205,000.00	137.04	386.795.000,00	77.15
Jumlah		500.000.000,00	685,205,000.00	137.04	386.795.000,00	77.15



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.1.1.1.1 RETRIBUSI DAERAH

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>500.000.000,00</u>	<u>685,205,000.00</u>	<u>386.795.000,00</u>

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 685,205,000.00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.386.795.000,00. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Pendapatan Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas retribusi Jasa Usaha. Anggaran dan realisasi pada TA 2024 untuk retribusi daerah serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
A	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	95.000.000,00	170,520,000.00	179.49	131,545,000.00	29.63
	Retribusi Pemakaian Alat	405.000.000,00	514,685,000.00	127.08	255,250,000.00	101.64
	Jumlah	500.000.000,00	685,205,000.00	137.04	386.795.000,00	77.15

Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 685,205,000.00. Pendapatan retribusi daerah di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 298,410,000.00 atau 77.15% dari tahun sebelumnya. Kenaikan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah paling dominan disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada Retribusi Pemakaian Alat yaitu sebesar Rp. 259,435,000.00 atau 101.64% dari Tahun 2023.

4.1.2 BELANJA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>608.767.318.044,00</u>	<u>564,451,078,762.00</u>	<u>485.362.122.704,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas: Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
216.509.904.978,00	200,655,193,390.00	143.165.785.757,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Akuntansi Belanja Dan Beban sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah.

Tabel 15 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	10,515,359,600.00	9,472,226,600.00	90.08	8,496,567,682.00	11.48
2	Belanja Barang dan Jasa	192,253,727,196.00	178,286,764,490.00	92.74	122,422,111,275.00	45.63
3	Belanja Hibah	13,740,818,182.00	12,896,202,300.00	93.85	12,247,106,800.00	5.30
Jumlah		216,509,904,978.00	200,655,193,390.00	92.68	143,165,785,757.00	40.16

Realisasi Belanja Operasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 57,489,407,633.00 atau sebesar 40.16% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
10,515,359,600.00	9,472,226,600.00	8,496,567,682.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.9,472,226,600.00 dan Rp.8,496,567,682.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,456,444,520.00	4,805,269,147.00	88.07	4,293,357,729.00	11.92
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,039,915,080.00	4,647,957,453.00	92.22	4,203,209,953.00	10.58
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00	0.00	-
Jumlah		10,515,359,600.00	9,472,226,600.00	90.08	8,496,567,682.00	11.48

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.975,658,918.00 atau sebesar 11.48% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
192,253,727,196.00	178,286,764,490.00	122,422,111,275.00

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 178,286,764,490.00 dan Rp.122,422,111,275.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang	26,854,004,768.00	24,937,020,925.00	92.86	18,587,464,816.00	34.16
2	Belanja Jasa	19,647,744,191.00	18,613,106,606.00	94.73	16,052,098,536.00	15.95
3	Belanja Pemeliharaan	136,135,420,237.00	126,301,677,554.00	92.78	85,119,625,152.00	48.38
4	Belanja Perjalanan Dinas	4,666,558,000.00	3,484,959,405.00	74.68	2,662,922,771.00	30.87
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	100.00	0.00	-
Jumlah		192,253,727,196.00	178,286,764,490.00	92.71	122,422,111,275.00	45.63



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.55,864,653,215.00 atau sebesar 45.63% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
13,740,818,182,00	12,896,202,300.00	12,247,106,800,00

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jumlah realisasi Belanja Hibah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.12,896,202,300.00 dan Rp.12,247,106,800,00 terdiri atas:

Tabel 18 Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13,590,818,182.00	12,762,419,300.00	93.90	11,208,128,800.00	13.87
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150,000,000.00	133,783,000.00	89.19	1,038,978,000.00	-87.12
Jumlah		13,740,818,182.00	12,896,202,300.00	93.85	12,247,106,800.00	5.30

Realisasi Belanja Hibah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 649,095,500.00 atau sebesar 5.30% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.5,477,000,000.00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.5,543,590,998.00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.131,181,494,241.00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.249,977,283,727.00, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.78,044,100.00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19 Realisasi Belanja Modal 2024

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Tanah	5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	57.33	825,184,613.00	280.51
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,543,590,998.00	5,263,486,329.00	94.95	839,086,126.00	527.29
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131,181,494,241.00	127,452,081,567.00	97.16	114,596,973,800.00	11.22
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249,977,283,727.00	227,877,916,976.00	91.16	225,935,092,408.00	0.86
5	Belanja Modal Aset Lainnya	78,044,100.00	62,500,000.00	80.08	0.00	-
JUMLAH		392,257,413,066.00	363,795,885,372.00	92.74	342,196,336,947.00	6.31

4.1.2.2.1 BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	825,184,613.00

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp3,139,900,500.00 dan Rp.825,184,613.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20 Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Tanah	5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	57.33	825,184,613.00	280.51
JUMLAH		5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	57.33	825,184,613.00	280.51



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 21 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Tanah Persil	0.00	0.00	0.00	90,750,000.00	-100.00
2	Lapangan	5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	57.33	734,434,613.00	327.53
JUMLAH		5,477,000,000.00	3,139,900,500.00	57.33	825,184,613.00	280.51

Realisasi Belanja Modal Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2,314,715,887.00 atau sebesar 280.51% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>5,543,590,998.00</u>	<u>5,263,486,329.00</u>	<u>839,086,126.00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.5,263,486,329.00 dan Rp.839,086,126.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Besar	4,200,600,020.00	4,105,000,000.00	97.72	133,348,000.00	2978.41
2	Belanja Modal Alat Angkutan	66,604,762.00	49,760,000.00	74.71	0.00	#DIV/0!
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	102,915,171.00	78,809,910.00	76.58	29,900,000.00	163.58
4	Belanja Modal Alat Pertanian	2,220,000.00	2,000,000.00	90.09	0.00	#DIV/0!
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	739,245,828.00	646,950,149.00	87.51	172,552,284.00	274.93
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	73,313,835.00	61,013,878.00	83.22	118,333,000.00	-48.44
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	8,588,493.00	7,500,000.00	87.33	0.00	#DIV/0!
8	Belanja Modal Komputer	350,102,889.00	312,452,392.00	89.25	384,952,842.00	-18.83
Jumlah		5,543,590,998.00	5,263,486,329.00	94.95	839,086,126.00	527.29



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 23 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ Penurunan %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Alat Besar Darat	4,200,600,020.00	4,105,000,000.00	97.72	0.00	#DIV/0!
2	Alat Bantu	0.00	0.00	0.00	133,348,000.00	-100.00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	66,604,762.00	49,760,000.00	74.71	0.00	#DIV/0!
4	Alat Bengkel Bermesin	2,763,900.00	2,050,000.00	74.17	0.00	#DIV/0!
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	22,451,271.00	2,450,000.00	10.91	0.00	#DIV/0!
6	Alat Ukur	77,700,000.00	74,309,910.00	95.64	29,900,000.00	148.53
7	Alat Pengolahan	2,220,000.00	2,000,000.00	90.09	0.00	#DIV/0!
8	Alat Kantor	28,725,235.00	24,987,388.00	86.99	47,814,234.00	-47.74
11	Alat Rumah Tangga	685,345,793.00	621,962,761.00	90.75	117,614,250.00	428.82
10	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25,174,800.00	0.00	0.00	7,123,800.00	-100.00
11	Alat Studio	73,313,835.00	61,013,878.00	83.22	118,333,000.00	-48.44
12	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8,588,493.00	7,500,000.00	87.33	0.00	#DIV/0!
13	Komputer Unit	282,944,725.00	251,736,892.00	88.97	252,250,410.00	-0.20
14	Peralatan Komputer	67,158,164.00	60,715,500.00	90.41	132,702,432.00	-54.25
Jumlah		5,543,590,998.00	5,263,486,329.00	94.95	839,086,126.00	527.29

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.4,424,400,203.00 atau sebesar 527.29% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.2.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>131,181,494,241.00</u>	<u>127,452,081,567.00</u>	<u>114,596,973,800.00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

masing-masing sebesar Rp. 127,452,081,567.00 dan Rp.114,596,973,800.00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	129,293,138,241.00	125,727,424,567.00	97.24	114,596,973,800.00	9.71
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,888,356,000.00	1,724,657,000.00	91.33	0.00	#DIV/0!
Jumlah		131,181,494,241.00	127,452,081,567.00	97.23	114,596,973,800.00	11.22

Tabel 25 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	129,293,138,241.00	125,727,424,567.00	97.24	114,596,973,800.00	9.71
2	Tugu/Tanda Batas	1,888,356,000.00	1,724,657,000.00	91.33	0.00	#DIV/0!
Jumlah		131,181,494,241.00	127,452,081,567.00	97.23	114,596,973,800.00	11.22

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 12,855,107,767.00 atau sebesar 11.22% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.2.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>249,977,283,727.00</u>	<u>227,877,916,976.00</u>	<u>225,935,092,408.00</u>

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 227,877,916,976.00 dan Rp.225,935,092,408.00 terdiri atas:

Tabel 26 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	144,553,935,358.00	132,916,352,610.00	91.95	107,297,164,153.00	23.88
2	Belanja Modal Bangunan Air	105,423,348,369.00	94,961,564,366.00	90.08	107,382,996,535.00	-11.57
3	Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00	11,175,655,600.00	-100.00
4	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00	79,276,120.00	-100.00
Jumlah		249,977,283,727.00	227,877,916,976.00	91.16	225,935,092,408.00	0.86



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 27 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Jalan	90,158,937,850.00	80,386,427,624.00	89.16	87,818,225,097.00	-8.46
2	Jembatan	54,394,997,508.00	52,529,924,986.00	96.57	19,478,939,056.00	169.68
3	Bangunan Air Irigasi	3,898,687,916.00	3,736,504,625.00	95.84	13,539,539,000.00	-72.40
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50,313,502,298.00	43,724,345,865.00	86.90	36,686,816,900.00	19.18
5	Bangunan Air Bersih/Air Baku	27,879,744,530.00	25,922,256,796.00	92.98	33,512,102,635.00	-22.65
6	Bangunan Air Kotor	23,331,413,625.00	21,578,457,080.00	92.49	23,644,538,000.00	-8.74
7	Instalasi Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	11,175,655,600.00	-100.00
8	Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00	79,276,120.00	-100.00
Jumlah		249,977,283,727.00	227,877,916,976.00	91.16	225,935,092,408.00	0.86

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.1,942,824,568.00 atau sebesar 0.86% dari tahun sebelumnya.

4.1.2.2.5 BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
78,044,100.00	62,500,000.00	0.00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.62,500,000.00 dan Rp 0.00 Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 28 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Aset Tidak Berwujud	78,044,100.00	62,500,000.00	80.08	0.00	100.00
Jumlah		78,044,100.00	62,500,000.00	80.08	0.00	100.00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.62,500,000.00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.2 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4.2.1 ASET

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
2.019.565.025.510,85	1.655.866.560.738,85

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
43.060.000,00	140.480.600,00

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

4.2.1.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.2.1.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4.2.1.1.3 PERSEDIAAN

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
43.060.000,00	140.480.600,00

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Saldo Persediaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.43.060.000,00 dan Rp.140.480.600,00. Rincian saldo persediaan sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Saldo Persediaan

No.	Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
	Barang Pakai Habis	43.060.000,00	140.480.600,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	43.060.000,00	140.480.600,00
1	Alat Tulis Kantor	6.616.000,00	12.370.300,00
2	Kertas dan Cover	0,00	2.474.000,00
3	Bahan Komputer	34.915.000,00	118.992.300,00
4	Perabot Kantor	1.529.000,00	6.545.000,00
	Obat-obatan	0,00	99.000,00
5	Obat	0,00	99.000,00
	Jumlah	43.060.000,00	140.480.600,00

4.2.1.2 ASET TETAP

31 Desember 2024
(Rp)

2.011.529.935.414,85

31 Desember 2023
(Rp)

1.647.796.550.042,85

Saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.011.529.935.414,85 dan tahun 2023 sebesar Rp.1.647.796.550.042,85 terdiri atas:

Tabel 30 Rincian Saldo Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Tanah	315.183.400.710,15	312.043.500.210,15	3.139.900.500,00	1,01
2.	Peralatan dan Mesin	20.921.361.710,65	15.657.875.381,65	5,263,486,329.00	33.62
3.	Gedung dan Bangunan	145.765.555.785,25	18.313.474.218,25	127,452,081,567.00	695.95
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.531.103.773.094,60	2.303.225.856.118,60	227,877,916,976.00	9.89
5.	Aset Tetap Lainnya	1.111.106.657,00	1.111.106.657,00	-	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.679.845.346,00	16.679.845.346,00	-	0.00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.019.235.107.888,80)	(1.019.235.107.888,80)	-	0.00
Jumlah		2.011.529.935.414,85	1,647,796,550,042.85	363,733,385,372.00	22.07

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut.

4.2.1.2.1 TANAH

31 Desember 2024

(Rp)

315.183.400.710,15

31 Desember 2023

(Rp)

312.043.500.210,15

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.315.183.400.710,15 dan Rp.312.043.500.210,15 Realisasi Tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.139.900.500,00 atau sebesar 1,01% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 31 Rincian Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	- Tanah Persil	2,674,094,360.00	2,674,094,360.00	-	0.00
2	- Tanah Non Persil	2,928,557,776.00	2,928,557,776.00	-	0.00
3	- Lapangan	309,580,748,574.15	306,440,848,074.15	3,139,900,500.00	1.02
Jumlah		315,183,400,710.15	312,043,500,210.15	3,139,900,500.00	1.01

4.2.1.2.2 PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2024

(Rp)

20.921.361.710,65

31 Desember 2023

(Rp)

15.657.875.381,65

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp.20.921.361.710,65 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.657.875.381,65 Realisasi peralatan dan mesin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 5,263,486,329.00 atau sebesar 33.62% dengan rincian perhitungan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 32 Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Alat Besar Darat	9,215,100,375.00	5,110,100,375.00	4,105,000,000.00	80.33
2	Alat Bantu	311,501,500.00	311,501,500.00	-	0.00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	2,033,578,828.20	1,983,818,828.20	49,760,000.00	2.51
4	Alat Angkutan Apung Bermotor	69,300,000.00	69,300,000.00	-	0.00
5	Alat Bengkel Bermesin	28,068,000.00	26,018,000.00	2,050,000.00	7.88
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	393,136,500.00	390,686,500.00	2,450,000.00	0.63
7	Alat Ukur	1,108,652,056.00	1,034,342,146.00	74,309,910.00	7.18
8	Alat Pengolahan	609,337,500.00	607,337,500.00	2,000,000.00	0.33
9	Alat Kantor	713,266,010.00	688,278,622.00	24,987,388.00	3.63
10	Alat Rumah Tangga	1,989,654,661.97	1,367,691,900.97	621,962,761.00	45.48
11	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	143,823,900.40	143,823,900.40	-	0.00
12	Alat Studio	770,909,392.65	709,895,514.65	61,013,878.00	8.59
13	Alat Komunikasi	55,843,000.00	55,843,000.00	-	0.00
14	Peralatan Pemancar	348,694,188.00	348,694,188.00	-	0.00
15	Unit Alat Laboratorium	280,985,047.00	280,985,047.00	-	0.00
16	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	28,375,000.00	20,875,000.00	7,500,000.00	35.93
17	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	32,386,000.00	32,386,000.00	-	0.00
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	600.00	600.00	-	0.00
19	Persenjataan Non Senjata Api	3,207,000.00	3,207,000.00	-	0.00
20	Komputer Unit	1,772,524,882.43	1,520,787,990.43	251,736,892.00	16.55
21	Peralatan Komputer	996,626,869.00	935,911,369.00	60,715,500.00	6.49
22	Alat Pelindung	13,500,000.00	13,500,000.00	-	0.00
23	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2,291,000.00	2,291,000.00	-	0.00
Jumlah		20,921,361,710.65	15,657,875,381.65	5,263,486,329.00	33.62

4.2.1.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2024

(Rp)

145,765,555,785.25

31 Desember 2023

(Rp)

18,313,474,218.25

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar dan 2023 sebesar Rp.145,765,555,785.25 dan Rp18,313,474,218.25. Realisasi Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

kenaikan sebesar Rp 127,452,081,567.00 atau sebesar 695.95% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.825.490.329,95	16,098,065,762.95	125,727,424,567.00	781.01
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	140,420,000.00	140,420,000.00	-	0.00
3	Tugu/Tanda Batas	3,799,645,455.30	2,074,988,455.30	1,724,657,000.00	83.12
Jumlah		145,765,555,785.25	18,313,474,218.25	127,452,081,567.00	695.95

4.2.1.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

**31 Desember 2024
(Rp)**

2,531,103,773,094.60

**31 Desember 2023
(Rp)**

2,303,225,856,118.60

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 2,531,103,773,094.60 dan Rp 2,303,225,856,118.60. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 227,877,916,976.00 atau sebesar 9.89% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Jalan	1,263,813,055,859.72	1,183,426,628,235.72	80,386,427,624.00	6.79
2	Jembatan	381,055,521,650.41	328,525,596,664.41	52,529,924,986.00	15.99
3	Bangunan Air Irigasi	116,810,234,320.14	113,073,729,695.14	3,736,504,625.00	3.30
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	14,885,155,107.00	14,885,155,107.00	-	0.00
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	19,288,827,754.02	19,288,827,754.02	-	0.00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	305,459,627,169.96	261,735,281,304.96	43,724,345,865.00	16.71
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	51,091,279,252.00	51,091,279,252.00	-	0.00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	147,245,126,398.00	121,322,869,602.00	25,922,256,796.00	21.37
9	Bangunan Air Kotor	26,838,094,910.00	5,259,637,830.00	21,578,457,080.00	410.27
10	Instalasi Air Bersih/Air Baku	22,123,677,575.00	22,123,677,575.00	-	0.00
11	Instalasi Air Kotor	5,325,920,000.00	5,325,920,000.00	-	0.00
12	Jaringan Air Minum	176,487,730,598.35	176,487,730,598.35	-	0.00
13	Jaringan Listrik	27,775,000.00	27,775,000.00	-	0.00
14	Jaringan Telepon	267,971,000.00	267,971,000.00	-	0.00
15	Jaringan Gas	383,776,500.00	383,776,500.00	-	0.00
Jumlah		2,531,103,773,094.60	2,303,225,856,118.60	227,877,916,976.00	9.89



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.2.1.2.5 ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1,111,106,657.00	1,111,106,657.00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1,111,106,657.00 dan sebesar Rp.1,111,106,657.00. Realisasi Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 35 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	14,397,000.00	14,397,000.00	-	0.00
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1,039,659,657.00	1,039,659,657.00	-	0.00
3	Barang Bercorak Kesenian	49,250,000.00	49,250,000.00	-	0.00
4	Alat Bercorak Kebudayaan	7,800,000.00	7,800,000.00	-	0.00
Jumlah		1,111,106,657.00	1,111,106,657.00	-	0.00

4.2.1.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
16,679,845,346.00	16,679,845,346.00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 16,679,845,346.00 dan Rp 16,679,845,346.00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 36 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	16,679,845,346.00	16,679,845,346.00	-	0.00
Jumlah		16,679,845,346.00	16,679,845,346.00	-	0.00

4.2.1.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(1,019,235,107,888.80)	(1,019,235,107,888.80)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(1,019,235,107,888.80) dan Rp (1,019,235,107,888.80). Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 37 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024				Kenaikan/ Penurunan	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan	Pengurangan			
			(Rp)	(Rp)			
1	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.412.987.337,65)	-	-	(12.412.987.337,65)	-	0.00
2	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.259.527.196,00)	-	-	(4.259.527.196,00)	-	0.00
3	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.002.562.593.355,15)	-	-	(1.002.562.593.355,15)	-	0.00
Jumlah		(1,019,235,107,888.80)	-	-	(1,019,235,107,888.80)	-	0.00

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan *overhaul* (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

4.2.1.3 ASET LAINNYA

31 Desember 2024

(Rp)

7,992,030,096.00

31 Desember 2023

(Rp)

7,992,030,096.00

Saldo Aset Lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7,992,030,096.00 dan 2023 sebesar Rp 7,992,030,096.00. terdiri atas:

Tabel 38 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Aset Tak Berwujud	812,037,000.00	749,537,000.00	62,500,000.00	8.34
2	Aset Lain-lain	7,766,226,090.42	7,766,226,090.42	-	0.00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud	(379,233,000.00)	(379,233,000.00)	-	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(206,999,994.42)	(206,999,994.42)	-	0.00
Jumlah		7,992,030,096.00	7,929,530,096.00	62,500,000.00	0.79

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

4.2.1.3.1 ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2024

(Rp)

812,037,000.00

31 Desember 2023

(Rp)

749,537,000.00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 812,037,000.00 dan Rp 749,537,000.00. Aset Tidak Berwujud berupa *Software*, dan Kajian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	255,717,000.00	62,500,000.00	-	318,217,000.00	62,500,000.00	24.44
2	Kajian	493,820,000.00	-	-	493,820,000.00	-	0.00
Jumlah		749,537,000.00	62,500,000.00	-	812,037,000.00	62,500,000.00	8.34

Realisasi aset tak berwujud Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.62,500,000.00 atau sebesar 8.34% dari tahun sebelumnya.

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal *Software* sebesar Rp.62,500,000.00 berupa *Aplikasi SmartOffice*.

Adapun rincian Amortisasi Aset Tak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 40 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	(Rp)	%
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			
1	Software	(181,705,000.00)	-	-	(181,705,000.00)	-	0.00
2	Kajian	(197,528,000.00)	-	-	(197,528,000.00)	-	0.00
Jumlah		(379,233,000.00)	-	-	(379,233,000.00)	-	0.00

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.2.1.3.2 ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2024
(Rp)

7,766,226,090.42

31 Desember 2023
(Rp)

7,766,226,090.42

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 7,766,226,090.42 dan Rp 7,766,226,090.42 . Realisasi Aset Lain-lain Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Rincian Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	7,766,226,090.42	7,766,226,090.42	-	0.00
Jumlah		7,766,226,090.42	7,766,226,090.42	-	0.00

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Tabel 42 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	(206,999,994.42)	(206,999,994.42)	-	0.00
Jumlah		(206,999,994.42)	(206,999,994.42)	-	0.00

4.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

31 Desember 2024
(Rp)

28.692.768,00

31 Desember 2023
(Rp)

24.703.682,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 28.692.768,00 dan Rp. 24.703.682,00 terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 43 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Utang Belanja	28.692.768,00	24.703.682,00	3,989,086.00	16.15
Jumlah		28.692.768,00	24.703.682,00	3,989,086.00	16.15

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

4.2.2.1.1 UTANG BELANJA

31 Desember 2024

(Rp)

28.692.768,00

31 Desember 2023

(Rp)

24.703.682,00

Saldo Utang Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 28.692.768,00 dan Rp.24.703.682,00. Utang Belanja terdiri dari Utang Barang dan Jasa. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	25,366.00	(25,366.00)	0,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	394.300,00	226,000.00	168,300.00	74.47
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	28.298.468,00	24,452,316.00	3,846,152.00	15.73
Jumlah		28.692.768,00	24.703.682,00	3,989,086.00	16.15

4.2.3 EKUITAS

31 Desember 2024

(Rp)

1.771.687.545.320,47

31 Desember 2023

(Rp)

1.407.993.069.634,47

Saldo Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.771.687.545.320,47 dan Rp1.407.993.069.634,47.



4.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

4.3.1.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 45 Pendapatan LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15
Jumlah		685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 685.205.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp386.795.000,00

Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan retribusi Daerah yang dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 46 Pendapatan Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Laboratorium	170.520.000,00	131.545.000,00	38.975.000,00	29,63
2	Retribusi Pemakaian Alat	514.685.000,00	255.250.000,00	259.435.000,00	101,64
Jumlah		685.205.000,00	386.795.000,00	298.410.000,00	77,15

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.298.410.000,00 atau sebesar 77,15%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.1.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian Beban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut.

Tabel 47 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	9.472.226.600,00	8.535.616.768,00	936.609.832,00	10,97
2	Beban Barang dan Jasa	178.388.174.176,00	122.489.059.529,00	55.899.114.647,00	45,64
3	Beban Hibah	12.896.202.300,00	12.247.106.800,00	649.095.500,00	5,30
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	149.907.400,00	(149.907.400,00)	(100,00)
Jumlah		200.756.603.076,00	143.421.690.497,00	57.334.912.579,00	39,98

Realisasi Beban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 57.334.912.579,00 atau sebesar 39,98% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

4.3.1.2.1 BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Hibah.

Tabel 48 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	9.472.226.600,00	8.535.616.768,00	936.609.832,00	10,97
2	Beban Barang dan Jasa	178.388.174.176,00	122.489.059.529,00	55.899.114.647,00	45,64
3	Beban Hibah	12.896.202.300,00	12.247.106.800,00	649.095.500,00	5,30
Jumlah		200.756.603.076,00	143.271.783.097,00	57.484.819.979,00	40,12



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.1.2.1.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.472.226.600,00 dan Rp.8.535.616.768,00. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	3.355.634.761,00	3.011.849.869,00	343.784.892,00	11,41
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	318.829.116,00	284.778.278,00	34.050.838,00	11,96
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	3.355.634.761,00	3.011.849.869,00	343.784.892,00	11,41
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	318.829.116,00	284.778.278,00	34.050.838,00	11,96
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	152.390.000,00	150.365.000,00	2.025.000,00	1,35
6	Beban Tunjangan Beras ASN	70.690.000,00	65.100.000,00	5.590.000,00	8,59
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	115.410.000,00	114.490.000,00	920.000,00	0,80
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	188.871.360,00	183.313.575,00	5.557.785,00	3,03
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	301.091.436,00	199.641.101,00	101.450.335,00	50,82
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	54.017,00	43.072,00	10.945,00	25,41
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	274.634.704,00	258.958.229,00	15.676.475,00	6,05
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.825.837.741,00	3.495.030.385,00	330.807.356,00	9,47
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	822.119.712,00	747.228.654,00	74.891.058,00	10,02
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	100,00
Jumlah		9.472.226.600,00	8.535.616.768,00	936.609.832,00	10,97

Realisasi Beban Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 936.609.832,00 atau sebesar 10,97% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4.3.1.2.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.178.385.475.618,00 dan Rp.122.489.059.529,00. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

1) Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.034.441.525,00 dan Rp.18.653.705.989,00. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	23.053.701.160,00	14.591.770.624,00	8.461.930.536,00	57,99
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	17.691.000,00	19.940.000,00	(2.249.000,00)	(11,28)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	208.178.800,00	196.054.350,00	12.124.450,00	6,18
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	376.823.560,00	(376.823.560,00)	(100,00)
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.050.500,00	0,00	5.050.500,00	100,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	472.315.675,00	311.288.325,00	161.027.350,00	51,73
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	112.269.000,00	68.367.750,00	43.901.250,00	64,21
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	51.320.000,00	36.320.000,00	15.000.000,00	41,30
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	176.630.390,00	85.484.830,00	91.145.560,00	106,62
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33.262.500,00	15.023.000,00	18.239.500,00	121,41
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.918.500,00	23.176.500,00	1.742.000,00	7,52
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.700.000,00	7.216.000,00	(4.516.000,00)	(62,58)
14	Beban Obat-Obatan-Obat	99.000,00	(99.000,00)	198.000,00	(200,00)
15	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
16	Beban Makanan dan Minuman Rapat	734.940.000,00	736.907.500,00	(1.967.500,00)	(0,27)
17	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	86.035.000,00	0,00	86.035.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
18	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	49.335.000,00	0,00	49.335.000,00	100,00
19	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	2.185.432.550,00	(2.185.432.550,00)	(100,00)
Jumlah		25.034.441.525,00	18.653.705.989,00	6.380.735.536,00	34,21

Realisasi Beban Persediaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.380.735.536,00 atau sebesar 34,21% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Jasa

Beban Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.18.613.106.606,00 dan Rp.16.052.805.617,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 51 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	269.000.000,00	87.412.500,00	181.587.500,00	207,74
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	552.500.000,00	482.518.000,00	69.982.000,00	14,50
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	297.000.000,00	192.000.000,00	105.000.000,00	54,69
4	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.866.150.000,00	3.418.750.000,00	1.447.400.000,00	42,34
5	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	417.600.000,00	417.600.000,00	0,00	0,00
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.812.000.000,00	1.801.200.000,00	10.800.000,00	0,60
7	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.389.500.000,00	2.652.700.000,00	(263.200.000,00)	(9,92)
9	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
10	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	77.200.000,00	(77.200.000,00)	(100,00)
11	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,26
12	Beban Tagihan Telepon	177.562,00	304.392,00	(126.830,00)	(41,67)
13	Beban Tagihan Air	5.569.500,00	2.120.000,00	3.449.500,00	162,71
14	Beban Tagihan Listrik	322.988.698,00	259.692.619,00	63.296.079,00	24,37



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
15	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	115.817.184,00	116.934.926,00	(1.117.742,00)	(0,96)
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.348.800,00	4.322.880,00	25.920,00	0,60
18	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.436.000,00	5.403.600,00	32.400,00	0,60
19	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	144.400.000,00	30.600.000,00	113.800.000,00	371,90
20	Beban Sewa Mebel	25.133.600,00	31.657.000,00	(6.523.400,00)	(20,61)
21	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
22	Beban Sewa Bangunan Terbuka	67.932.000,00	72.150.000,00	(4.218.000,00)	(5,85)
23	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
24	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00
25	Beban Sewa Hotel	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
26	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.756.030.700,00	2.150.617.900,00	605.412.800,00	28,15
27	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	179.280.200,00	294.868.000,00	(115.587.800,00)	(39,20)
28	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.033.416.000,00	911.616.800,00	121.799.200,00	13,36
29	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	295.728.000,00	0,00	295.728.000,00	100,00
30	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	845.883.000,00	(845.883.000,00)	(100,00)
31	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.040.297.962,00	1.138.847.000,00	(98.549.038,00)	(8,65)
32	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.081.500.400,00	495.007.000,00	586.493.400,00	118,48
33	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	100,00
34	Beban Bimbingan Teknis	571.300.000,00	512.900.000,00	58.400.000,00	11,39
Jumlah		18.613.106.606,00	16.052.805.617,00	2.560.300.989,00	15,95

Realisasi Beban Jasa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.560.300.989,00 atau sebesar 15,95% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

3) BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.126.259.908.082,00 dan Rp.85.119.625.152,00. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	55.867.500,00	19.000.000,00	36.867.500,00	194,04
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	17.304.000,00	0,00	17.304.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	28.906.000,00	0,00	28.906.000,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	47.409.285,00	182.762.000,00	(135.352.715,00)	(74,06)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	409.000,00	(409.000,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	75.192.700,00	70.205.650,00	4.987.050,00	7,10
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	110.303.500,00	43.127.500,00	67.176.000,00	155,76
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.686.000,00	101.621.000,00	(19.935.000,00)	(19,62)
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	16.920.000,00	(16.920.000,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	100,00
13	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.070.000,00	0,00	16.070.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
14	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	100,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.396.419.000,00	86.037.000,00	1.310.382.000,00	1.523,04
16	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	70.007.678.705,00	57.411.695.652,00	12.595.983.053,00	21,94
17	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.668.301.288,00	0,00	4.668.301.288,00	100,00
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	10.486.359.450,00	0,00	10.486.359.450,00	100,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	7.671.139.192,00	12.516.442.000,00	(4.845.302.808,00)	(38,71)
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	1.356.485.100,00	357.632.000,00	998.853.100,00	279,30
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.433.725.800,00	6.376.393.400,00	(3.942.667.600,00)	(61,83)
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	0,00	7.926.479.950,00	(7.926.479.950,00)	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	27.314.222.562,00	0,00	27.314.222.562,00	100,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	443.888.000,00	0,00	443.888.000,00	100,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	55.867.500,00	19.000.000,00	36.867.500,00	194,04
26	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	17.304.000,00	0,00	17.304.000,00	100,00
Jumlah		126.259.908.082,00	85.119.625.152,00	41.140.282.930,00	48,33

Realisasi Beban Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.41.140.282.930,00 atau sebesar 48,33% dari tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

4) BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.484.959.405,00 dan Rp.2.662.922.771,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.040.934.405,00	2.236.695.271,00	804.239.134,00	35,96
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	444.025.000,00	426.227.500,00	17.797.500,00	4,18
Jumlah		3.484.959.405,00	2.662.922.771,00	822.036.634,00	30,87

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.822.036.634,00 atau sebesar 30,87% dari tahun sebelumnya.

5) BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.950.000.000,00 dan Rp. 0,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 54 Rincian Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4.950.000.000,00	0,00	4.950.000.000,00	100,00
Jumlah		4.950.000.000,00	0,00	4.950.000.000,00	100,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.950.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

4.3.1.2.1.3 BEBAN HIBAH

Beban Hibah merupakan beban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Laut Nomor 79 Tahun 2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.896.202.300,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.247.106.800,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 55 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	1.351.660.000,00	(1.351.660.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	12.762.419.300,00	9.856.468.800,00	2.905.950.500,00	29,48
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	133.783.000,00	1.038.978.000,00	(905.195.000,00)	(87,12)
Jumlah		12.896.202.300,00	12.247.106.800,00	649.095.500,00	5,30

Realisasi Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 649.095.500,00 atau sebesar 5,30% dari tahun sebelumnya.

4.3.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp149.907.400,00. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 56 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	149.907.400,00	(149.907.400,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	149.907.400,00	(149.907.400,00)	(100,00)

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp149.907.400,00 atau sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya.

4.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.771.687.545.320,47 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 1.407.993.069.634,47 dikurang Defisit LO



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 200.071.398.076,00 ditambah RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 563.765.873.762,00.

4.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.407.993.069.634,47 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023.

4.4.2 SURPLUS/(DEFISIT)-LO TAHUN ANGGARAN 2024

Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 200.071.398.076,00 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2024. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

4.4.3 RK PPKD

RK PPKD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 563.765.873.762,00.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

5.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

5.1.1 BENCANA ALAM

Dalam kurun waktu pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024, terjadi beberapa bencana alam di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya sebagai berikut:

1. Angin Puting Beliung di Kecamatan Takisung pada bulan Februari 2024

Desa yang terdampak Angin Puting Beliung pada bulan Februari 2024 di Kecamatan Takisung adalah Desa Kuala Tambangan

2. Banjir di Kecamatan Jorong pada bulan Juni 2024

Desa yang terdampak banjir pada bulan juni 2024 di Kecamatan Jorong adalah Desa Asam-Asam

3. Banjir di Kecamatan Batu Ampar bulan Agustus 2024

Desa yang terdampak banjir pada bulan Agustus 2024 di Kecamatan Batu Ampar adalah Desa Damar Lima, Blurur, Jilatan, Damit, Damit Hulu dan Ambawang

4. Angin Puting Beliung di Kecamatan Panyipatan pada bulan Desember 2024

Desa yang terdampak Angin Puting Beliung pada bulan desember 2024 di Kecamatan Panyipatan adalah Desa Batu Tungku.

5.2 PEKERJAAN FISIK DAN KONSULTAN YANG BATAL DILAKSANAKAN

Pencapaian realisasi belanja tahun 2024 mencapai 92,72%, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya, meskipun tidak mencapai 100%, hal ini dikarenakan:

1. Efisiensi dari selisih Pagu DPA/DPPA dengan nilai kontrak.
2. Efisiensi dari selisih harga antara harga pasar dengan harga DPA, dimana Harga Pasar lebih rendah dari harga DPA.
3. Ada beberapa pekerjaan fisik dan konsultan yang Batal dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Pekerjaan fisik dan konsultan yang batal dilaksanakan dirincian sebagai berikut :

➤ **Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**

Tabel 57 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

NO.	URAIAN	Dana DPA (Rp.)	KETERANGAN
	Program Penataan Bangunan Gedung		
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Pembangunan Halaman dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	200.000.000,00	Batal karena sudah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan
2.	Pembangunan Fasilitas Ruang Terbuka Layanan Pendidikan	100.000.000,00	Batal karena sudah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan
3.	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Sekretariat DPRD	16.145.454,00	Batal karena Pemeliharaan gedung DPRD pagu Rp.350.000.000,-, dalam pelaksanaan cukup dilaksanakan dengan nilai pagu Rp.200.000.000,- sehingga diawasi oleh tenaga teknis dinas
TOTAL		316.145.454,00	

➤ **Bidang Bina Marga**

Tabel 58 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Bidang Bina Marga

NO.	URAIAN	Dana DPA (Rp.)	KETERANGAN
	Program Penyelenggaraan Jalan		
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan		
1.	Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Simp. Empat Asam-Asam Riam Adungan	100.000.000,00	Batal karena Pekerjaan Peningkatan Jalan Simp. Empat Asam-Asam - Riam Adungan batal dilaksanakan
2.	Peningkatan Jalan Simp. Empat Asam-Asam - Riam Adungan	4.897.979.697,00	Batal karena Jalan Simpang Empat Asam-Asam Riam Adungan masih berstatus Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan No. SK. 1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan.
TOTAL		4,997,979,697,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

➤ **Bidang Sumber Daya Air**

Tabel 59 Rincian Pekerjaan Fisik dan Konsultan yang batal dilaksanakan pada Sumber Daya Air

NO.	URAIAN	Dana DPA (Rp.)	KETERANGAN
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
1.	Konsultan Penilai Tanah - Pengadaan Tanah Embung Riam Pinang Kecamatan Bajuin	100.000.000,00	Batal karena Pengadaan Tanah Embung Riam Pinang Kecamatan Bajuin batal dilaksanakan.
2.	Pengadaan Tanah Embung Riam Pinang Kecamatan Bajuin	2.160.000.000,00	Batal karena masih terdapat permasalahan pada kepemilikan yang sah atas persil tanah yang akan dibebaskan.
TOTAL		2.260.000.000,00	



BAB VI

BAB VII

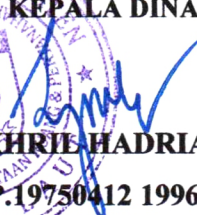
PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.

Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2024 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.685.205.000,00 atau 137,04%. Belanja dianggarkan sebesar Rp. 608.767.318.044,00 yang terealisasi sebesar Rp. 564.451.078.762,00 atau 92,72%. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.


KEPALA DINAS

SYAKHRIL HADRIANADI, ST
NIP.19750412 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005 Fax. 21157

BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)
Periode 01 Januari 2024 s.d 31 December 2024

Nomor : 000.2.3.1/ -SET/DPUPRP/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024 bertempat di Tanah Laut, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos**
NIP : 197007051993031004
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bertindak sebagai Pengawas dalam melakukan Stock Opname Persediaan yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- Nama : **TEDY PERMANA, S.Pd**
NIP : 198402122011011003
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna bertindak sebagai Pelaksana dalam melakukan Stock Opname Persediaan yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa barang persediaan pada unit DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
, Sub Unit DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Ket
1	1.1.12.1.03.01	Alat Tulis Kantor	210	6.616.000,00	
2	1.1.12.1.03.06	Bahan Komputer	157	34.915.000,00	
3	1.1.12.1.03.07	Perabot Kantor	28	1.529.000,00	
JUMLAH			395	43.060.000,00	

Pihak Pertama

MUHAMAD AMIN SUPRIYADI,
S.Sos
NIP. 197007051993031004



Mengetahui,

Pihak Kedua

TEDY PERMANA, S.Pd
NIP. 198402122011011003

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAMPIRAN BERITA ACARA INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)
01 Januari 2024 s/d 31 December 2024

Unit : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sub Unit : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rekening : Semua Rekening Terpilih

No	NUSP	Spesifikasi Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Nilai Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.12.1.3.1 Alat Tulis Kantor			210			6.616.000,00
1	0507	Isi Stapler 10	200	Buah	1.850,00	370.000,00
2	5088	Pulpen Gel	6	Pak	41.000,00	246.000,00
3	0951	Tinta Foto Copy	4	Buah	1.500.000,00	6.000.000,00
1.1.12.1.3.6 Bahan Komputer			157			34.915.000,00
4	4155	CARTRIDGE HITAM CANON	69	Buah	295.000,00	20.355.000,00
5	4301	CARTRIDGE WARNA CANON	28	Buah	295.000,00	8.260.000,00
6	18080	Tinta E Print	30	Botol	65.000,00	1.950.000,00
7	16575	Tinta Printer Warna	30	Buah	145.000,00	4.350.000,00
1.1.12.1.3.7 Perabot Kantor			28			1.529.000,00
8	4471	Hand Sanitaizer	27	Botol	55.000,00	1.485.000,00
9	15132	Serok Sampah	1	Buah	44.000,00	44.000,00
JUMLAH			395			43.060.000,00

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

MUHAMAD AMIN SUPRIYADI, S.Sos
NIP. 197007051993031004



Tanah Laut, 31 December 2024
Pengurus Barang Pengguna

TEDY PERMANA, S.Pd
NIP. 198402122011011003

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
SYAKRIL HADRIANADI, ST
NIP. 197504121996031002



Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Plethari 70800

**TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID**

.....
Tanggal : 20-01-2025 09:05:06
No. Resi : 70800-11/2025/800889
Petugas : 550012367
.....

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 221400030175
NAMA : WORK SHOP LAB
TARIF/DAYA : P1/5500 VA
BL/TH : JAN25
STAND METER : 00045627-00045930
RP TAG PLN : Rp 326.028
NO REF :
1070800065500123679052130000
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah.
ADMIN POS : Rp 3.500
TOTAL BAYAR : Rp 329.528 ✓

Terima Kasih

POS IND

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

Download PLN Mobile

NFWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

.....
Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai informasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

☎ Halo Pos 1500161 @posindonesia.19



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Ppd. Pleihari 70000

**TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID**

Tanggal : 20-01-2025 09:04:26
No. Resi : 70000-11/2025/000006
Petugas : 550012367

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 221400019302
NAMA : NTR DEU KAB DATI II
TARIF/DAYA : P1/41500 VA
BL/TH : JAN25
STAND METER : 00532370-00540817
Rp TAG PLN : Rp 14.364.130
NO REF :
1070800025500123679050060000
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah.
ADMIN POS : Rp 3.500
TOTAL BAYAR : Rp 14.367.730 ✓

Terima Kasih
POS IND

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

Download PLN Mobile

NWFP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi:

☎ Halo Pos 1500161 @posindonesia.13



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Ppd. Pleihari 70000

**TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID**

Tanggal : 20-01-2025 09:04:37
No. Resi : 70000-11/2025/000006
Petugas : 550012367

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 221400105958
NAMA : P U BINA MARGA
TARIF/DAYA : P1/66000 VA
BL/TH : JAN25
STAND METER : 00003759-00004088
Rp TAG PLN : Rp 11.211.002
NO REF :
1070800025500123679051470000
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah.
ADMIN POS : Rp 3.500
TOTAL BAYAR : Rp 11.215.102 ✓

Terima Kasih
POS IND

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"

Download PLN Mobile

NWFP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi:

☎ Halo Pos 1500161 @posindonesia.13



Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc, Pleihari 70800

**TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID**

Tanggal : 20-01-2025 09:04:47
No. Resi : 70800-11/2025/800887
Petugas : 550012367

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 221400700866
NAMA : KANTOR PUPRP TA LA
TARIF/DAYA : P1/23000 VA
BL/TH : JAN25
STAND METER : 00000287-00001195
RP TAG PLN : Rp 1.563.566
NO REF :
1070800065500123679051640000
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah.
ADMIN POS : Rp 3.500
TOTAL BAYAR : Rp 1.567.068 ✓

Terima Kasih
POS IND

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile
NPPW : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

☎ Halo Pos 1500161 @posindonesia.id



Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc, Pleihari 70800

**TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID**

Tanggal : 20-01-2025 09:04:59
No. Resi : 70800-11/2025/800886
Petugas : 550012367

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
IDPEL : 221400030167
NAMA : WORK SHOP DEUDTALA
TARIF/DAYA : B1/5500 VA
BL/TH : JAN25
STAND METER : 00009931-00010605
RP TAG PLN : Rp 815.540 ✓
NO REF :
1070800065500123679051890000
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah.
ADMIN POS : Rp 3.500
TOTAL BAYAR : Rp 819.040 ✓

Terima Kasih
POS IND

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau
Hub PLN Terdekat :"
Download PLN Mobile
NPPW : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos
Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu.
Informasi data pribadi yang diberikan
hanya diproses untuk penyelenggaraan
layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi
yang disertakan dalam transaksi ini
diproses sesuai dengan kebijakan privasi
yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami,
Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

☎ Halo Pos 1500161 @posindonesia.id



Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Pleihari 70800

TANDA TERIMA
PDAM KAB. TANAH LAUT

Tanggal : 20-01-2025 09:05:27
No. Resi : 70800-11/2025/800891
Petugas : 550012367

ID PELANGGAN : 0000406
NAMA : 4-WORK SHOP PU
ALAMAT : JL.GAGAS RT 21/06
TARIF : K-3IP,TNI/P
PERIODE : DESEMBER 2024
STAND METER :
PEMAKAIAN : 14 M3
TAGIHAN : Rp. 145.800
DENDA : Rp. 0

LAIN-LAIN : Rp. 0
POTONGAN : Rp. 0
TOTAL TAGIHAN: Rp. 145.800
BY JARINGAN : Rp. 1.000
ADMIN POS : Rp. 2.500
TOTAL BAYAR : Rp. 149.300
(seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
Bukti Pembayaran ini adalah SAH jika sudah dibubuhi CAP POS
NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu. Informasi data pribadi yang diberikan hanya diproses untuk penyelenggaraan layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi yang disertakan dalam transaksi ini diproses sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku dan dapat diakses pada www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami, Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

Halo Pos 1500161 @posindonesia.id



Logistik Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kpc. Pleihari 70800

TANDA TERIMA
PDAM KAB. TANAH LAUT

Tanggal : 20-01-2025 09:05:21
No. Resi : 70800-11/2025/800890
Petugas : 550012367

ID PELANGGAN : 0001037
NAMA : 4-DINAS PUD TALA
ALAMAT : JL.PERK.GAGAS RT 21/06
TARIF : K-3IP,TNI/P
PERIODE : DESEMBER 2024
STAND METER :
PEMAKAIAN : 25 M3
TAGIHAN : Rp. 241.500
DENDA : Rp. 0

LAIN-LAIN : Rp. 0
POTONGAN : Rp. 0
TOTAL TAGIHAN: Rp. 241.500
BY JARINGAN : Rp. 1.000
ADMIN POS : Rp. 2.500
TOTAL BAYAR : Rp. 245.000
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Bukti Pembayaran ini adalah SAH jika sudah dibubuhi CAP POS
NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

Simpan resi ini sbg bukti pembayaran sah.

Kami sangat menghargai privasi Bp/Ibu. Informasi data pribadi yang diberikan hanya diproses untuk penyelenggaraan layanan yang Bp/Ibu gunakan. Data pribadi yang disertakan dalam transaksi ini diproses sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku dan dapat diakses pada

www.posindonesia.co.id.

Terima kasih telah memilih kami, Sampai jumpa di transaksi berikutnya...

Untuk informasi hubungi

Halo Pos 1500161 @posindonesia.id